

Tinjauan Teori atas Rekonstruksi Etika Profesi Akuntan Berdasarkan Nilai-nilai Islam

A Theory Review on the Reconstruction of Professional Accountant Ethics Based on Islamic Values

Matnin

ABSTRACT

This study aims to see; the values contained in professional ethics according to SPAP, analyze the ethics of the accounting profession from an Islamic perspective and find the formulation of the professional ethics of accountants according to Islam. Based on the purpose of this study, it is hoped that it can serve as an alternative to the ethics of the accounting profession which is not only not in line with Islamic teachings but is also considered not to show balance, justice, and honesty as desired by Islam. So that the professional ethics of sharia accountants are expected to be able to prevent the emergence of "immoral" accountants to provide benefits to all parties.

Keywords: Professional Ethics, Islamic Values, SPAP

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat; nilai-nilai yang terkandung dalam etika profesi menurut SPAP, menganalisis etika profesi akuntan dari perspektif Islam, dan Menemukan formulasi etika profesi akuntan menurut Islam. Berdasarkan tujuan penelitian ini diharapkan mampu sebagai alternatif dari etika profesi akuntan yang bukan saja tidak sejalan dengan ajaran Islam, tetapi juga dinilai tidak menunjukkan keseimbangan, keadilan, dan kejujuran sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam. Sehingga etika profesi akuntan syariah diharapkan mampu mencegah timbulnya tindakan "amoral" akuntan agar dapat memberikan manfaat terhadap semua pihak.

Kata Kunci: Etika Profesi, Nilai-nilai Islam, SPAP



JIHBIZ
Jurnal Ekonomi,
Keuangan dan
Perbankan Syariah
P-ISSN 1238-1235

Vol. 2 No. 2 2018
Page 93-116

Published by:

Program Studi Ekonomi Syariah dan
Program Studi Perbankan Syariah
Universitas Islam Raden Rahmat Malang,
Indonesia

Website:

<http://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/jihbiz/>

Article's DOI:

<https://doi.org/10.33379/jihbiz.v2i2.770>



Author(s):

Matnin

Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan,
Indonesia

Email: fatih.matnin@gmail.com

Correspondence:

fatih.matnin@gmail.com

Article Type:

Viewpoint

1. Pendahuluan

Profesi akuntan ada karena kepercayaan masyarakat yang menuntut profesionalisme, dan etika profesi digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan profesionalisme. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa kode etik IAI dimaksudkan sebagai panduan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, pekerja di lingkungan dunia usaha, instansi pemerintah maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya (Tommy, 1999).

Etika profesi (kode etik) diciptakan dengan harapan dapat mengarahkan akuntan untuk berbuat etis. Namun ternyata masih banyak tindakan tidak etis yang dilakukan oleh para akuntan. Dengan demikian, kode etik yang seharusnya dapat memberi pengarahan pada anggota untuk bertindak etis tidak berjalan efektif.

Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan saat ini sudah mulai tampak. Hal ini terungkap pada *World Congress of Accountants* ke 16 di Hongkong, bahwa saat sekarang profesi akuntan telah mengalami krisis kepercayaan (Anonim 1, 2003, p. 4). Presiden *International Federation of Accountants* (IFAC) Rene Ricol menyatakan bahwa ada 3 hal yang harus diakui keberadaannya oleh para akuntan saat ini, agar para akuntan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Tiga hal tersebut adalah mengakui kebutuhan agar bekerja sesuai dengan hukum dan kode etik, selalu menerapkan standar yang dimiliki, dan mengakui adanya pihak-pihak lain yang mengawasi pekerjaan yang dilakukan (Anonim 1, 2003, p. 4). Peran kode etik profesi akuntan sangat penting karena ia menjadi landasan bertindak bagi para akuntan dalam menjalankan profesinya.

Faktor agama dan budaya memiliki pengaruh yang besar dalam merumuskan etika bisnis (Sabri dan Jabr, 1992 dalam Harahap, 1997, p. 230). Agama dan budaya menyumbangkan etika bisnis dalam dua hal: Pertama, Agama dan budaya merupakan sumber hukum utama, peraturan dan kode etik lainnya; dan kedua, Agama dan budaya dianggap lebih independen dalam etika bisnis di antara jenis etika bisnis lainnya.

Lagi pula etika agama diakui oleh keyakinan masyarakat di mana etika ini dianggap lebih tinggi daripada kode etik dan hukum lainnya (Sabri dan Jabr, 1992 dalam Harahap, 1997, p. 230).

Dari latar belakang yang diuraikan, maka pertanyaan penelitian disampaikan, pertama bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam etika profesi akuntan menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Kedua, bagaimana etika profesi akuntan jika ditinjau dari perspektif Islam (*syariah*). Dan ketiga, bagaimana formulasi etika profesi akuntan menurut perspektif Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam etika profesi menurut SPAP dan menganalisis etika profesi akuntan dari perspektif Islam.

2. Kajian Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Maryani dan Ludigdo (2002) dalam Kusuma (2003) menunjukkan bahwa dua faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku etis akuntan adalah religiositas dan pendidikan. Religiositas adalah mengenai aktivitas beragama yang bukan hanya terjadi ketika seorang melakukan perilaku ritual (ibadah), tapi juga ketika melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan lahir. Religiositas memiliki lima dimensi yaitu keyakinan, peribadatan, penghayatan, pengamalan dan pengetahuan. Sedangkan faktor pendidikan adalah mengenai pendidikan formal, non formal dan informal. Dan dari kedua faktor di atas, sekiranya dapat dikatakan bahwa keduanya bisa dimunculkan dari seorang akuntan atau calon akuntan dengan memberikannya melalui pengajaran, baik di sekolah, di rumah maupun dalam masyarakat.

Purba (2003), meneliti mengenai peranan manajemen *qalbu* dalam pengambilan keputusan etis akuntan. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa; (a) Hati adalah merupakan komponen

mendasar dari manusia di mana hati juga merupakan komponen metafisik yang mampu memberikan bimbingan dan menentukan baik tidaknya seseorang termasuk akuntan. (2) Berdasarkan struktur diri manusia, apabila akal manusia dipengaruhi hati maka perilaku yang dihasilkan akan menjadi etis, dan sebaliknya apabila akalnya dipengaruhi oleh nafsu maka perilakunya menjadi tidak etis.

Fauroni (2002) memfokuskan diri pada etika bisnis dalam perspektif Al-Quran. Hasil penelitiannya menunjukkan, bahwa prinsip-prinsip etika bisnis dalam Al-Quran adalah: kesatuan etika dan bisnis, keseimbangan (keadilan), kehendak bebas, pertanggungjawaban, kebenaran, kebajikan dan kejujuran.

2.2 Konsep Kapitalisme

2.2.1 Tujuan yang Ingin Dicapai

Ilmu ekonomi konvensional telah mencanangkan dua tujuan yaitu tujuan positif dan tujuan normatif (Chapra, 2000, p. 19-20). Dikategorikan sebagai tujuan positif karena dicapai tanpa penilaian (*value judgement*), dan berhubungan dengan realisasi “efisiensi” dan “pemerataan” dalam alokasi dan distribusi sumber daya. Tujuan yang lain dapat dianggap sebagai normatif, pandangan dalam bentuk tujuan-tujuan sosio ekonomi yang secara universal diinginkan seperti pemenuhan kebutuhan, keadaan kesempatan kerja penuh, laju pertumbuhan ekonomi optimal, distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil (merata), stabilitas ekonomi, keseimbangan lingkungan hidup, yang semuanya selain menambah keharmonisan sosial dan menghapus anomie, hal ini dianggap normatif karena merefleksikan, dalam skala tertentu, pandangan masyarakat tentang apa yang seharusnya. Kedua tujuan ini dimaksudkan untuk melayani kepentingan individu maupun masyarakat sejalan dengan pandangan dunia yang menggarisbawahinya.

2.2.2 Pandangan Kapitalis

Pandangan dunia kapitalis sangat dipengaruhi oleh gerakan pencerahan yang berlangsung dari permulaan abad 17 sampai abad 19, atau abad ini sering disebut sebagai “abad rasio”. Gerakan ini menolak peranan apa pun yang berasal dari wahyu dalam mengatur urusan-urusan manusia, sebaliknya menempatkan penekanan besar pada kemampuan dan kekuatan akal untuk membedakan antara baik dan buruk dan mengatur semua aspek kehidupan.

2.2.3 Tujuan Vs Pandangan Dunia Kapitalis

Tujuan yang ingin dicapai oleh kapitalisme seperti yang diuraikan sebelumnya adalah tujuan positif dan normatif. Namun tujuan tersebut tidak dapat dipenuhi secara bersamaan karena tujuan normatif yang berisi tujuan *humanitarian* dapat dipenuhi hanya jika ada kerelaan untuk mengurangi tujuan positifnya (tidak konsisten satu sama lain). Tujuan normatif merupakan suatu produk sekunder dari pandangan dunia keagamaan yang menekankan peran keimanan kepada Tuhan, pertanggungjawaban manusia di hadapan-Nya, persaudaraan manusia, dan nilai-nilai moral dalam alokasi dan distribusi sumber daya. Sekalipun ada upaya untuk menjustifikasi tujuan-tujuan ini melalui penggunaan suatu *rational* “alasan” ekonomi, namun bentuk asli dan justifikasinya terletak pada pandangan dunia keagamaan (Chapra, 2001, p. 16-17).

2.2.4 Ekonomi Kapitalis

1. Manusia ekonomi rasional (*rational economic man*)

Manusia sebagai makhluk yang berakal sudah wajar jika ia menggunakan akal/ rasionya dalam kegiatan ekonomi. Faktor-faktor dalam rasionalitas akan mencakup baik faktor ekonomi maupun non ekonomi, sesuai dengan tujuan masyarakat yang ingin diwujudkan. Sehingga perilaku rasional secara otomatis akan teridentifikasi dengan perilaku yang kondusif sebagai realisasi tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

2. Positivisme

Argumen positivisme adalah bahwa setiap individu adalah hakim terbaik bagi kepentingan dirinya sendiri dan harus dibiarkan untuk memiliki berbagai alternatif yang ia pandang paling sesuai dengan kepentingannya. Ia tidak boleh dibelenggu oleh batasan-batasan apakah itu moral atau yang lain. Penekanan yang berlebihan pada kebebasan individu telah menimbulkan suatu *anatema* berkaitan dengan penilaian dan netralitas nilai. Ilmu ekonomi akhirnya dianggap “netral sepenuhnya antara tujuan-tujuan” dan independen dari segala macam posisi etika atau penilaian normatif. Hal ini menimbulkan pengabaian peran nilai moral sebagai alat untuk memfilter dalam alokasi dan distribusi sumber daya dan menganggap faktor-faktor seperti cita rasa, preferensi dan lembaga sosio ekonomi sebagai variabel eksogenus (tidak dapat ditentukan nilainya karena telah ditetapkan di luar sistem).

3. Hukum Say

Jean-Baptiste Say terkenal karena Hukum Say (atau Hukum Pasar Say). Hukum ini mengatakan, seperti halnya dengan alam semesta, ekonomi akan berjalan mulus bila dibiarkan bergerak sendiri. Produksi akan menciptakan permintaannya sendiri dan tidak akan ada kelebihan produksi dan pengangguran. Setiap tendensi untuk menciptakan kelebihan produksi atau pengangguran akan dikoreksi secara otomatis, sehingga tidak memerlukan intervensi.

Kapitalisme cenderung melihat semua persoalan dari sudut pandang pemilik kapital. Hal ini bisa dibuktikan jika kita melihat postulat, asumsi, dan prinsip ekonomi kapitalis.

2.3 Etika Profesi Akuntan

Etika profesi akuntan ialah norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku dan bertujuan untuk melindungi kepentingan anggota dan kepentingan masyarakat yang menggunakan jasa profesi (Fauziyah, p. 2004).

Dalam menjalankan tugasnya seorang akuntan diatur oleh suatu kode etik akuntan. Kode etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merupakan norma perilaku yang mengatur hubungan antara akuntan dengan para klien, antara akuntan dengan sejawatnya dan antara profesi akuntan dengan masyarakat. Kebenaran kode etik menyatakan secara eksplisit beberapa kriteria tingkah laku yang harus ditaati oleh profesi.

2.3.1 Pentingnya Etika Profesi Akuntan

Masyarakat menuntut profesionalisme akuntan dalam pelaksanaan pekerjaannya. Masyarakat telah memberi arti khusus pada istilah profesional, mereka diharapkan bertindak pada tingkat yang lebih tinggi dari pada kebanyakan anggota masyarakat. Istilah profesional berarti tanggung jawab untuk berperilaku yang lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan lebih dari sekedar memenuhi undang-undang dan peraturan masyarakat (Yusuf, 1996, p. 72). Alasan yang mendasar berperilaku profesional yang tinggi pada setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan profesi, begitu juga bagi para akuntan harus dapat meyakinkan pemakai laporan keuangan atas kualitas laporan keuangan. Salah satu cara untuk mewujudkan perilaku profesional tersebut adalah dengan mengeluarkan etika profesi akuntan.

2.3.2 Kode Etik Akuntan Indonesia (IAI)

Kode etik IAI yang berlaku saat ini adalah kode etik yang disahkan dalam kongres IAI VIII tahun 1998. Kode etik tersebut terdiri dari empat bagian, yaitu:

1. Prinsip Etika

Prinsip etika memberikan kerangka dasar bagi aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota yang terdiri dari delapan prinsip yaitu: Prinsip tanggung jawab profesi, Prinsip Kepentingan Publik, Prinsip Integritas, Prinsip Obyektivitas, Prinsip Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional, Prinsip Kerahasiaan, Prinsip Perilaku Profesional, dan Prinsip Standar Teknis.

2. Aturan Etika

Sebelum tahun 1998, IAI hanya mempunyai kode etik yang mengikat seluruh anggotanya. Aturan-aturan yang berlaku dalam kode etik dirumuskan dan disahkan kongres IAI yang meliputi seluruh anggota IAI tanpa melihat keanggotaan kompartemen anggota yang bersangkutan. Akan tetapi, setelah tahun 1998, seluruh anggota telah memiliki aturan etika masing-masing. Dengan demikian kode etik IAI memiliki empat aturan etika kompartemen, yaitu:

- a. Aturan etika Kompartemen Akuntan Publik (KAP)
- b. Aturan etika Kompartemen Akuntan Pendidik (KAPd)
- c. Aturan etika Kompartemen Akuntan Manajemen (KAM)
- d. Aturan etika Kompartemen Akuntan Sektor Publik (KASP)

3. Interpretasi Aturan Etika

Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh pengurus kompartemen setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak berkepentingan lainnya sebagai panduan dalam penerapan aturan etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya.

4. Tanya dan Jawab

Tanya dan jawab memberikan penjelasan atas setiap pertanyaan dari anggota kompartemen tentang aturan etika beserta interpretasinya.

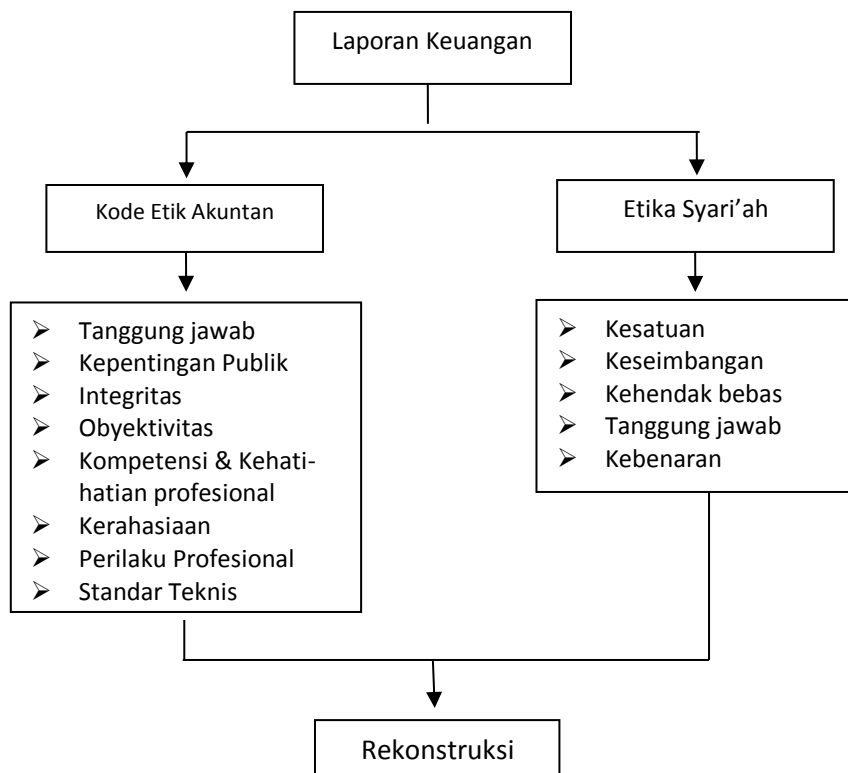
2.4 Etika Syariah (Islam)

Menurut Munawir (1999, p. 91) laporan audit merupakan alat komunikasi antara auditor dengan Fakhurasi (1997) dalam Abdurrahman (2000), menyatakan bahwa syariah ialah hukum-hukum disyariatkan Allah Taala untuk hamba-Nya yang disampaikan oleh seorang nabi dari nabi-nabi, mengenai amal perbuatan maupun akidah. Pengertian syariat ini bersifat umum, bukan hanya yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW tetapi juga pada rasul-rasul yang lain. Namun syariat yang disampaikan kepada rasul yang satu tidak mengikat umat rasul yang lain (kemudian).

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad (2004, p. 53-57), bahwa sistem etika Islam menggunakan lima aksioma, yaitu: Kesatuan (*unity*), Keseimbangan, Kehendak bebas, Tanggung jawab, dan Kebajikan (*ihsan*).

2.5 Kerangka Konseptual

Hukum Islam memainkan peran yang banyak dalam merumuskan etika bisnis, khususnya sebagai sumber penyusunan etika, termasuk etika profesi akuntan.



**Gambar 1 Kerangka konseptual Etika yang
Disarankan oleh Lingkungan Islam**

3. Metode Penelitian

3.1 Definisi Operasionalisasi Variabel

3.1.1 Etika Profesi

Etika profesi ialah norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku dan bertujuan untuk melindungi kepentingan anggota dan kepentingan masyarakat yang menggunakan jasa profesi.

3.1.2 Nilai-nilai Islam (Syariah)

Etika kerja Islam dibentuk oleh lima aksioma etika ekonomi Islam (Muhammad, 2004, p. 53), yaitu: Kesatuan (keesaan), Keseimbangan, Kehendak bebas, Tanggung jawab, dan Kebenaran,

3.2 Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari: literatur, diskusi dan intuitif-subyektif. Data yang diperoleh dari literatur baik dari SPAP, buku-buku literatur, jurnal-jurnal penelitian, makalah, artikel majalah akuntansi --baik akuntansi konvensional maupun akuntansi Islam (syariah)-- serta rujukan dari hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tema yang diambil.

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi eksternal yaitu pengumpulan data yang dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari luar suatu organisasi. Pengumpulan fakta dari bahan dokumen ini akan membuat deskripsi dan keadaan teoritis sehingga akan terjadi interaktif antara fakta dan teori pada umumnya.

3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif, yaitu, menganalisis data yang diperoleh selama studi kepustakaan untuk dideskripsikan guna mengkaji masalah dengan pendekatan teoritis.

Alat analisis data yang digunakan:

- a. Analisa Historis
- b. Analisa Komparasi
- c. Analisa Formulasi

4. Hasil Kajian dan Pembahasan

4.1 Kode Etik Profesi Akuntan dan Nilai Etika Islam dalam Komparasi

4.1.1 Prinsip Tanggung Jawab Profesi

Dalam prinsip tanggung jawab profesi akuntan tidak mencantumkan tanggung jawab terhadap Tuhan (sekuler), (Ghozali, 2003) sebagaimana dalam nilai-nilai Islam. Karena tanggung jawab terhadap Tuhan akan mengharuskan anggotanya untuk menggunakan pertimbangan moral dan profesional yang didasarkan pada agama. Sekularisme tersebut berarti memisahkan antara aktivitas profesi akuntan dengan agama yang muncul karena penggunaan rasionalitas, yang mengagungkan akal sehingga hal-hal yang di luar jangkauan akal (termasuk agama) tidak akan dimasukkan. Sebagaimana pada tabel 1 adalah perbandingan prinsip tanggung jawab dengan nilai-nilai Islam.

Tabel 1 Komparasi Prinsip Tanggung Jawab Profesi dalam Dimensi Islam

No	Nilai Islam	Prinsip Tanggung jawab Profesi
1.	Kesatuan (<i>Unity</i>)	Konsep tauhid, integritas antar semua bidang kehidupan; agama, ekonomi, sosial politik dan budaya.
2.	Keseimbangan (<i>Equilibrium</i>)	Adanya keseimbangan tanggung jawab, dalam dimensi vertikal dan horizontal.
3.	Kehendak bebas (<i>Ikhtiyar</i>)	Kemampuan bertindak, bertanggungjawab tanpa paksaan sesuai parameter ciptaan Tuhan.
4.	Tanggungjawab (<i>Accountability</i>)	Dua dimensi tanggung jawab, dimensi vertikal dan horizontal.
5.	Kebajikan (<i>Ihsan</i>)	Memberi kebaikan terhadap orang lain dan mampu mempertanggungjawabkannya.

Sumber : Beekun (1997) dalam Muhammad (2004, p. 54) dan diolah

4.1.2 Prinsip Kepentingan Publik

Definisi kepentingan publik yang dilayani oleh profesi akuntan terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan bisnis. Artinya, jika tidak ada kaitan dengan bisnis yang memberi kontribusi pada profesi akuntan, maka bukan merupakan bagian dari publik yang harus dilayani oleh akuntan, sehingga akuntan tidak perlu bertanggung jawab dengan apa yang akan terjadi dengannya. Dalam hal ini adalah kepentingan sosial, seperti lingkungan. Sebagaimana dalam Islam menaruh perhatian pada seluruh aspek, baik agama, ekonomi, sosial politik maupun budaya. Lebih jelasnya pada tabel 2 adalah perbandingan prinsip kepentingan dengan nilai-nilai Islam.

Tabel 2 Komparasi Prinsip Kepentingan Publik dalam Dimensi Islam

No	Nilai Islam	Prinsip Kepentingan Publik
1.	Kesatuan (<i>Unity</i>)	Orientasi kepentingan meliputi seluruh aspek; agama, ekonomi, sosial politik dan budaya.
2.	Keseimbangan (<i>Equilibrium</i>)	Tidak ada pemihakan, sehingga terjalin keseimbangan dalam setiap aspek.
3.	Kehendak bebas (<i>Ikhtiyar</i>)	Kemampuan bertindak untuk kepentingan publik tanpa intervensi dari pihak mana pun.
4.	Tanggungjawab (<i>Accountability</i>)	Adanya tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan, baik terhadap klien, publik ataupun lingkungan.
5.	Kebajikan (<i>Ihsan</i>)	Tindakan yang dilakukan untuk kepentingan publik hendaknya yang memberikan kebaikan pada semua pihak.

Sumber : Beekun (1997) dalam Muhammad (2004, p. 54) dan diolah

4.1.3 Prinsip Integritas

Dalam prinsip ini standar yang digunakan adalah akal (rasionalitas) manusia, sehingga kebenaran yang dianut juga kebenaran yang berdasarkan akal manusia. Selain itu anggota harus mengikuti prinsip objektivitas yang bebas dari segala pengaruh apa pun (*value free*) (Triuwono, 2000). Lain halnya dalam Islam, tidak hanya akal yang diutamakan tetapi juga moralitas, agama dan semua aspek yang mempengaruhinya. Yang paling penting dari sikap integritas adalah kepercayaan dan Islam selalu mensyaratkan perlunya jujur kepada Allah, kepada masyarakat dan diri sendiri (Harahap, 2002, p. 231). Sebagaimana pada tabel 3 adalah perbandingan prinsip integritas dengan nilai-nilai Islam.

Tabel 3 Komparasi Prinsip Integritas dalam Dimensi Islam

No	Nilai Islam	Prinsip Integritas
1.	Kesatuan (<i>Unity</i>)	Integritas yang dimiliki harus meliputi aspek; kualitas, obyektivitas, kehati-hatian profesional ataupun moralitas.
2.	Keseimbangan (<i>Equilibrium</i>)	Adanya keseimbangan dalam setiap aspek.
3.	Kehendak bebas (<i>Ikhtiyar</i>)	Berintegrasi sebeb-bebasnya tanpa melampaui batas yang telah ditentukan.
4.	Tanggungjawab (<i>Accountability</i>)	Integritas yang dilakukan harus dapat di pertanggungjawabkan, baik terhadap Tuhan, sosial dan lingkungan.
5.	Kebajikan (<i>Ihsan</i>)	Integritas yang dilakukan harus memberikan kebaikan bagi semua pihak.

Sumber : Beekun (1997) dalam Muhammad (2004, p. 54) dan diolah

4.1.4 Prinsip Obyektivitas

Dalam prinsip ini profesi akuntan melaksanakan tugasnya harus terbebas dari semua nilai (*value free*) (Triuwono, 2000), baik dari nilai-nilai yang dibawa oleh individu ataupun yang lain dan tidak dibelenggu oleh batasan-batasan seperti moral atau yang lain. Sebagaimana dalam Islam, semua aspek dalam kehidupan manusia baik agama, ekonomi, sosial politik maupun budaya membentuk satu kesatuan yang homogen. Obyektivitas mencakup juga bahwa ia tidak boleh mendelegasikan tugas dan pertimbangan profesinya kepada pihak lain yang tidak kompeten (Harahap, 2002, p. 238). Lebih jelasnya tabel 4 adalah perbandingan prinsip obyektivitas dengan nilai-nilai Islam.

Tabel 4 Komparasi Prinsip Obyektivitas dalam Dimensi Islam

No	Nilai Islam	Prinsip Obyektifitas
1.	Kesatuan (<i>Unity</i>)	Independensi harus berlaku dalam setiap aspek, termasuk moralitas.
2.	Keseimbangan (<i>Equilibrium</i>)	Bertindak adil dan obyektif terhadap semua orang, sebagai manifestasi dimensi horizontal.
3.	Kehendak bebas (<i>Ikhtiyar</i>)	Bertindak obyektif tanpa adanya intervensi dan paksaan dari pihak tertentu.
4.	Tanggungjawab (<i>Accountability</i>)	Independensi dan obyektivitas yang diemban harus juga dapat dipertanggungjawabkan terhadap lingkungan sosial dan Tuhan YME.
5.	Kebajikan (<i>Ihsan</i>)	Independensi dan Obyektivitas harus memberikan kebaikan terhadap semua pihak.

Sumber : Beekun (1997) dalam Muhammad (2004, p. 54) dan diolah

4.1.5 Prinsip Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Dalam prinsip ini profesi akuntan bekerja dengan kompetensi, kehati-hatian dan ketekunan yang lebih ditujukan kepada klien, sehingga klien memperoleh manfaat dari jasa profesionalnya. Di sini terlihat dengan jelas bahwa kepentingan utama yang dipenuhi dari kepentingan publik adalah klien, sehingga orientasi akuntan adalah kepada klien daripada pihak lain. Lain halnya dalam Islam lingkup yang menjadi tujuan dari kompetensi dan kehati-hatian lebih luas, bukan hanya pada klien saja tetapi pada semua aspek yang melingkupinya. Akuntan juga harus melaksanakan tugas dan jasa profesionalnya dan berusaha sekuat tenaga *at all cost*, sehingga ia bebas dari tanggung jawab yang dibebankan kepadanya bukan saja dari atasan, profesi, publik tetapi juga dari Allah SWT (Harahap, 2002, p. 239). Sebagaimana pada tabel 5 adalah perbandingan prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional dengan nilai-nilai Islam.

Tabel 5 Komparasi Prinsip Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional dalam Dimensi Islam

No	Nilai Islam	Prinsip Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional
1.	Kesatuan (<i>Unity</i>)	Kompetensi yang dimiliki harus meliputi semua aspek yang berhubungan dengan konsep tauhid.
2.	Keseimbangan (<i>Equilibrium</i>)	keseimbangan prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional atas aspek kehidupan manusia.
3.	Kehendak bebas (<i>Ikhtiyar</i>)	Dalam menjalankan prinsip ini harus tidak ada intervensi dari pihak tertentu.
4.	Tanggungjawab (<i>Accountability</i>)	Kompetensi dan kehati-hatian profesional yang dilakukan harus dapat di pertanggungjawabkan terhadap lingkungan sosial, terlebih kepada Tuhan YME.
5.	Kebajikan (<i>Ihsan</i>)	Kompetensi dan kehati-hatian profesional harus memberikan kebaikan pada masyarakat.

SumberfBeekun (1997) dalam Muhammad (2004, p. 54) dan diolah

4.1.6 Prinsip Kerahasiaan

Dalam prinsip kerahasiaan ruang lingkupnya lebih sempit lain halnya dalam Islam, wilayah kerahasiaan lebih luas meliputi semua aspek. Akuntan harus jujur dan dapat dipercaya juga harus dapat menghargai kerahasiaan informasi yang diketahuinya selama pelaksanaan tugas dan jasa baik kepada organisasi atau klien. Selain itu informasi dirahasiakan harus bisa

dipertanggungjawabkan baik di hadapan publik maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Harahap, 2002, p. 238). Sebagaimana pada tabel 6 adalah perbandingan prinsip kerahasiaan dengan nilai-nilai Islam.

Tabel 6 Komparasi Prinsip Kerahasiaan dalam Dimensi Islam

No	Nilai Islam	Prinsip Kerahasiaan
1.	Kesatuan (<i>Unity</i>)	Wilayah kerahasiaan harus integral meliputi semua aspek, yang berhubungan dengan konsep tauhid.
2.	Keseimbangan (<i>Equilibrium</i>)	Dalam merahasiakan informasi akuntansi tidak ada perbedaan terhadap berbagai pihak.
3.	Kehendak bebas (<i>Ikhtiyar</i>)	Walaupun ada kebebasan dalam bertindak tetapi kerahasiaan informasi harus tetap terjamin.
4.	Tanggungjawab (<i>Accountability</i>)	Setiap tindakan dan informasi yang dirahasiakan harus bisa dipertanggungjawabkan baik di hadapan publik maupun terhadap Tuhan YME.
5.	Kebajikan (<i>Ihsan</i>)	Kerahasiaan yang dijaga tentunya harus membawa kebaikan kepada semua pihak.

Sumber : Beekun (1997) dalam Muhammad (2004, p. 54) dan diolah

4.1.7 Prinsip Perilaku Profesional

Dalam prinsip perilaku profesional yang diharapkan hanya semata-mata untuk memperoleh kepercayaan publik sehingga batas prinsip ini lebih sempit, sebagaimana dalam kode etik profesi akuntan (Indonesia) khususnya prinsip pertama. Lain halnya dalam Islam, batasan lebih luas yang meliputi semua aspek, dan setiap perilaku profesional harus bisa dipertanggungjawabkan baik di hadapan publik maupun terhadap Allah SWT. Dan juga perilaku akuntan harus konsisten dengan keyakinan akan nilai Islam yang berasal dari prinsip dan aturan Islam (Harahap, 2002, p. 239). Lebih ringkasnya pada tabel 7 adalah perbandingan prinsip perilaku profesional dengan nilai-nilai Islam.

Tabel 7 Komparasi Prinsip Perilaku Profesional dalam Dimensi Islam

No	Nilai Islam	Prinsip Perilaku Profesional
1.	Kesatuan (<i>Unity</i>)	Perilaku profesional harus integral meliputi semua aspek, yang berhubungan dengan konsep tauhid.
2.	Keseimbangan (<i>Equilibrium</i>)	Dalam perilaku profesional tidak ada perbedaan terhadap berbagai pihak.
3.	Kehendak bebas (<i>Ikhtiyar</i>)	Ada kebebasan dalam berperilaku dan perilaku itu harus mampu menjaga nama baik profesi.
4.	Tanggungjawab (<i>Accountability</i>)	Setiap perilaku profesional yang dilakukan harus bisa dipertanggungjawabkan baik di hadapan publik maupun terhadap Tuhan YME, sebagai manifestasi dimensi horizontal dan vertikal.
5.	Kebajikan (<i>Ihsan</i>)	Perilaku profesional yang dilakukan tentunya harus membawa kebaikan kepada semua pihak.

Sumber : Beekun (1997) dalam Muhammad (2004, p. 54) dan diolah

4.1.8 Prinsip Standar Teknis

Dalam Prinsip ini menunjukkan kewajiban untuk mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sedangkan isi yang ada dalam standar yang harus dipatuhi tersebut sangat sarat dengan nilai kapitalis dan penggunaan etika utilitarian. Dalam Islam, akuntan harus

memperhatikan peraturan profesi yang didasarkan pada standar teknis yang tidak bertentangan dengan prinsip yang diatur dalam hukum *syariah* (Harahap, 2002, p. 239), pada tabel 8 adalah perbandingan prinsip standar teknis dengan nilai-nilai Islam.

Tabel 8 Komparasi Prinsip Standar Teknis dalam Dimensi Islam

No	Nilai Islam	Prinsip Standar Teknis
1.	Kesatuan (<i>Unity</i>)	Aturan dan standar teknis mencakup semua aspek, yang berhubungan dengan konsep tauhid.
2.	Keseimbangan (<i>Equilibrium</i>)	Dalam standar teknis semua aspek harus diperlakukan sama.
3.	Kehendak bebas (<i>Ikhtiyar</i>)	Ada kebebasan dalam menentukan standar teknis dan disesuaikan dengan kondisi akuntansi yang berlaku.
4.	Tanggungjawab (<i>Accountability</i>)	Setiap aturan dan standar yang dibuat harus bisa dipertanggungjawabkan baik di hadapan publik maupun terhadap Tuhan YME, sebagai manifestasi dimensi horizontal dan vertikal.
5.	Kebajikan (<i>Ihsan</i>)	Standar teknis dan aturan yang di buat tentunya harus membawa kebaikan kepada semua pihak.

Sumber : Beekun (1997) dalam Muhammad (2004, p. 54) dan diolah

4.2 Kelemahan Prinsip Kode Etik Akuntan Dalam Perspektif Islam

Penggunaan konsep kapitalis seperti dijelaskan sebelumnya akan mempunyai konsekuensi yang juga merupakan kelemahan bagi kapitalisme sendiri terutama dalam usaha untuk menciptakan filter bagi manusia, sehingga terbentuk manusia bermoral (beretika) yang bisa menjaga keseimbangan kepentingan pribadi dan kepentingan sosial sekaligus mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu kebahagiaan material dan spiritual atau positif dan normatif.

Beberapa kelemahan tersebut adalah orientasi yang berlebihan pada akal akan membuat manusia melupakan Tuhan dan ia berhak untuk melakukan apa pun dengan kehendaknya sendiri. Apalagi standar etika yang digunakan memberi justifikasi atas pemenuhan kepentingan pribadi tersebut dan rasionalitas mengartikan pemenuhan kepentingan diri sebagai usaha memenuhi kepentingan sosial. Kepentingan sosial pada dasarnya bermuara pada agama, tidak ada yang memberi pembenaran atas pemenuhan kepentingan sosial yang didasarkan pada kerelaan untuk mengorbankan kepentingan pribadi yang bersifat *mutually exclusive* terhadap kepentingan sosial selain agama.

Sekularitas yang dimiliki oleh kapitalisme mengakibatkan kapitalisme benar-benar tidak memiliki moral (sebagaimana cirinya yang *value free*) karena sumber moral yang utama adalah agama dan kapitalisme melepaskan diri darinya. Ketiadaan moral ini mengakibatkan kapitalisme tidak stabil dan mudah goyah serta mengakibatkan orang mementingkan kepentingan dirinya sendiri.

Apa yang ditetapkan oleh manusia sifatnya tidak menyeluruh, parsial sehingga sering kali apa yang ditetapkan mengakibatkan kebaikan pada satu sisi, namun tidak baik bahkan buruk akibatnya bagi sisi yang lain. Hal ini akan semakin parah akibatnya dalam kapitalisme sebab dalam kerangka kapitalisme manusia dibenarkan untuk memenuhi kepentingan diri atau nafsu yang apabila nafsu ini dibiarkan maka justru yang timbul adalah kerusakan.

Selain tidak komprehensif, moral yang ditetapkan oleh manusia juga tidak bersifat universal penggunaannya, sebab setiap orang akan mempunyai standar sendiri apa yang menurutnya baik atau buruk. Hal ini akan mengakibatkan penggunaannya menjadi sempit, sebab setiap orang juga tidak dapat menemukan jawaban rasional mengapa ia harus memiliki nilai moral yang sama dengan apa yang ditetapkan oleh orang lain jika nilai tersebut dibentuk hanya didasarkan pada kepentingan manusia yang membentuk nilai tersebut. Walaupun ada klaim yang mengatakan bahwa setiap orang ingin mencapai kebahagiaan, namun definisi kebahagiaan itu sangat relatif antara individu yang satu dengan individu yang lainnya.

Standar moral yang ditetapkan oleh manusia juga akan berubah-ubah setiap saat sesuai dengan kepentingannya, sehingga justru akan menimbulkan konflik dan perpecahan serta pertikaian antar manusia, sebab akan ada orang yang berusaha mempertahankan nilai tersebut sementara yang lain ingin mengubahnya. Penggunaan akal manusia sebagai sumber kebenaran juga akan membuat manusia memiliki pengetahuan yang sempit, yang hanya meliputi apa-apa yang dapat dilihat (konkret), sedangkan hal-hal yang bersifat gaib dikeluarkan dari kerangka pengetahuan manusia. Padahal itu ada dalam kehidupan, sehingga jika manusia dihadapkan pada masalah-masalah yang sifatnya gaib manusia tidak dapat menyelesaikannya. Itulah beberapa risiko yang harus dihadapi jika menggunakan rasio manusia sebagai sumber nilai (moral), sebab manusia tidak memiliki kapasitas untuk melakukan itu, apa yang dimiliki manusia bersifat terbatas.

Secara khusus penggunaan etika utilitarian terkait dengan tindakan etis individu memiliki kelemahan yang diakui secara universal. *Pertama*, etika utilitarian semata-mata memperlihatkan hasil akibat baik daripada tindakan buruk kita. Kondisi demikian orang cenderung akan melakukan tindakan menghalalkan segala cara, yang penting adalah akibatnya memberi kebaikan pada diri sendiri. Perhatian yang terlalu besar pada akibat (tujuan) mengakibatkan proses bagaimana suatu tindakan tidak diperhatikan, sehingga filternya sangat rendah.

Kedua, salah satu sisi yang memberi nama buruk kepada utilitarianisme adalah kemungkinan memakainya untuk membenarkan perbuatan yang menurut pendapat umum egois dan bahkan *immoral*. Hal ini akan memberi pengarahan pada seseorang untuk berbuat tidak etis karena menganggap perbuatan itu adalah perbuatan yang baik dengan alasan memenuhi kepentingan diri adalah perbuatan yang baik.

Ketiga, manfaat merupakan konsep yang luas sehingga dalam kenyataan praktis malah menimbulkan kesulitan yang tidak sedikit. Siapa yang memutuskan kepentingan, siapa lebih penting dari pada kepentingan orang lain. Setiap orang mempunyai preferensi tersendiri tentang apa yang menurutnya menyenangkan. Padahal sulit sekali menyatukan isi dari kebahagiaan itu sendiri tanpa ada konsensus dari individu-individu tentang apa yang tercakup dalam kebahagiaan. Ketiadaan konsensus dari individu inilah yang mengakibatkan masyarakat tidak memiliki filter yang disediakan oleh masyarakat yang merupakan konsensus bersama. Lemahnya filter yang disediakan oleh masyarakat ini mengakibatkan individu cenderung bertindak tidak etis.

Keempat, utilitarianisme tidak pernah menganggap serius nilai suatu tindakan pada dirinya sendiri, dan hanya memperhatikan nilai suatu tindakan sejauh berkaitan dengan akibatnya. Padahal, sangat mungkin terjadi suatu tindakan pada dasarnya tidak baik, ternyata mendatangkan keuntungan atau manfaat. Sering kali terjadi kondisi-kondisi yang tidak seperti biasanya, di mana hanya terdapat satu alternatif tindakan yang secara tindakan itu sendiri

sebenarnya tidak baik, namun kadang ketiadaan alternatif lain maka jika tindakan itu tidak dilakukan akan berakibat fatal, mungkin justru akan menimbulkan akibat yang jauh lebih besar jika tindakan itu tidak dilakukan. Dalam etika utilitarian, tindakan itu tidak boleh dilakukan karena pada dasarnya tindakan itu tidak baik.

Kelima, etika ini tidak pernah menganggap serius kemauan atau motivasi baik seseorang. Dalam etika utilitarian yang diperhatikan hanya akibatnya saja, tanpa memperhatikan motivasi dari pelaku. Hal ini mengakibatkan orang hanya mementingkan diri sendiri, sehingga tidak ada perbedaan antara orang yang memberi atau merelakan sebagian hartanya untuk orang lain karena ikhlas dan perbuatan itu memberi keuntungan pada diri. Di sini terlihat nilai ruhiyah dari suatu perbuatan menjadi nol (kosong), sehingga akan memacu orang untuk meninggalkan kepentingan sosial jika hal itu tidak mendatangkan keuntungan padanya. Hal ini membuktikan kekonsistenan etika utilitarian dengan sekularitas, karena keikhlasan (nilai ruhiyah) dari suatu perbuatan hanya bermuara pada agama dan agama telah dilepaskan prinsip sekuler, sehingga wajar jika utilitarian meninggalkannya juga.

Keenam, terjadi kesulitan dalam kuantifikasi manfaat karena tidak semua manfaat dapat dikuantitatifkan. Banyak sekali tindakan yang tidak dapat dinilai atau diukur secara kuantitatif. Hal ini akan menjadi sangat jelas kesulitannya jika yang menghadapi hal tersebut adalah orang yang beragama, bahkan di Indonesia tidak mengakui orang tidak beragama (ateis). Rasa tenang dan bahagia seseorang yang beragama tidak hanya dipenuhi dengan materi semata, tetapi justru sebaliknya kebahagiaan spiritual.

Ketujuh, utilitarianisme membenarkan hak kelompok minoritas tertentu dikorbankan demi kepentingan mayoritas (ketidakadilan). Artinya, etika utilitarianisme membenarkan penindasan dan ketidakadilan demi manfaat yang diperoleh sebagian orang. Orientasi ini akan sangat merugikan kepentingan kelompok minoritas yang seharusnya juga merupakan kepentingan yang harus dipenuhi bukan dimarginalkan (selalu dikorbankan) hanya untuk mencapai kepentingan kaum mayoritas.

Jika kita melihat kelemahan-kelemahan kapitalisme pada umumnya dan etika utilitarian khususnya seperti yang diuraikan dikaitkan dengan kepribadian manusia, maka hal itu cenderung akan menguatkan nafsu manusia yang selalu hanya mengutamakan kepentingan diri sendiri. Filter yang diharapkan dapat membendung tindakan serakah pun ternyata tidak dapat memberi kontribusi apa pun untuk membendung pemenuhan kepentingan diri sendiri, sebab pembenaran atas kepentingan diri sendiri memiliki posisi puncak dalam setiap pertimbangan moral individu.

Freud di dalam menganalisis pribadi manusia berpendapat bahwa pribadi manusia mempunyai tiga unsur kepribadian yaitu, Id, Ego dan Superego (Suryabrata, 1984, p. 105). Baik Id, Ego maupun Superego masing-masing memiliki daya pendorong yang disebut *chatexis*, sedangkan Ego dan Superego juga memiliki daya penahan yang disebut *anti-chatexis*. Daya-daya ini dapat pula disebut sebagai "kehendak" (Achmad, 1991, p. 43).

Nilai-nilai yang ada dalam utilitarian akan cenderung untuk memperkuat kehendak dari Id. Bahkan dalam posisi demikian akal sering kali digunakan oleh Id untuk memberi pembenaran atas apa yang dilakukan oleh Id. Inilah yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia sebab akal (Ego) yang diharapkan dapat menjadi salah satu filter dalam pribadi manusia telah digunakan oleh Id untuk memenuhi kehendak Id.

Relativitas kebenaran yang bersumber pada akal hasilnya tidak dapat dikatakan mutlak benar. Superego saja belum memadai untuk menjamin kebenaran setiap tindakan moral seseorang. Dengan demikian meskipun sebuah tindakan dihasilkan dari hasil kemenangan *anti-chatexis* Superego atas *chatexis* dari Id masih berpeluang bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai etis agama yang memiliki kebenaran mutlak.

Dalam kondisi demikian maka satu-satunya harapan yang dapat menjadi filter bagi tindakan manusia adalah filter yang disediakan oleh masyarakat, namun hal ini akan sangat sulit sebab dalam utilitarian masyarakat tidak ada konsensus tentang nilai yang dapat digunakan sebagai filter bagi individu yang disediakan oleh masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa prinsip utilitarianisme tidak dapat digunakan sebagai mekanisme filter. Walaupun dalam masyarakat ada kompetisi yang membantu melindungi kepentingan sosial, bisa saja para operator mendapatkan keuntungan yang tidak dihalalkan dengan melakukan kecurangan dan hambatan persaingan dalam suatu cara yang sulit dideteksi. Oleh karena itu harus ada kekuatan yang dapat memotivasi sehingga individu dapat dicegah dari perbuatan tidak etis, sekalipun pada saat itu ia dapat mengelabui orang lain. Chapra (2000, p. 7) menyatakan, bahwa prinsip *utility* tidak dapat memotivasi individu-individu untuk bertindak jujur dan tidak mengganggu kompetisi atau menggunakan cara-cara yang tidak *fair* untuk mendapatkan penghasilan, bahkan ketika memungkinkan baginya untuk mendapatkan hal itu dengan meloloskan diri, dan individu-individu tidak dapat memenuhi komitmen dan kewajiban sosialnya secara sadar dan bertanggungjawab dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan bersama-sama dengan anggota lain dalam masyarakat bersangkutan. Dengan demikian kapitalisme tidak dapat menyediakan filter bagi individu dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, sebaliknya justru akan membuat individu cenderung bertindak tidak etis.

Hal ini berbeda dengan *Syariah* yang digunakan oleh Islam sebagai standar baik dan buruk. *Syariah* akan menyediakan filter bagi individu dalam berbagai cara dan tingkatan. Pertama, filter yang diciptakan oleh *syariah* meliputi persoalan keinginan yang terbatas pada pusat muaranya, kesadaran individu yang paling dalam, dengan mengubah skala preferensinya seiring dengan tuntutan kedudukannya sebagai *khalifah* dan prinsip *adalah* (keadilan).

Filter moral menjadikan klaim-klaim pada sumber daya sebagai suatu fungsi kesejahteraan manusia dan tidak membiarkan penggunaannya untuk tujuan lain.

Dalam konteks pengelolaan sumber daya, *syariah* menyediakan aturan-aturan yang tertuang dalam konsep ekonomi Islam, yaitu: (1) *tauhid*, (2) *khalifah*, yang meliputi: persaudaraan universal, sumber daya adalah amanah, gaya hidup sederhana, kebebasan individu, (3) *'adalah* yang merupakan isi pokok dari tujuan *syariah*, antara lain meliputi: pemenuhan kebutuhan pokok, sumber pendapatan terhormat, distribusi pendapatan yang merata, pertumbuhan dan stabilitas (Chapra, 2000, p. 218).

Kedua, *syariah* menjadikan Tuhan sebagai pengawas yang hakiki dan terus menerus atas tindakan individu. Dengan cara demikian maka individu dalam setiap tindakannya akan selalu mengarah pada pelaksanaan atas apa yang diperintahkan, serta berusaha menjauhi apa yang dilarang. Filter ini tidak disediakan oleh etika utilitarian, sebab pandangan sekularis etika utilitarian menyebabkan agama tidak dilibatkan dalam aktivitas sosial, ekonomi, politik.

Ketiga, *syariah* menyediakan filter bagi individu melalui suatu konsensus bersama antar anggota masyarakat tentang hal-hal yang baik dan buruk dalam suatu masyarakat, sehingga ada legitimasi dan justifikasi bagi individu untuk mencegah individu lain dalam bertindak. Sumber kebenaran dalam *syariah* (etika) adalah kebenaran yang berasal dari Tuhan, sehingga sifatnya menjadi mutlak bukan kebenaran relatif yang berdasarkan rasionalitas semata. Ketentuan-ketentuan dalam *syariah* merupakan hal yang pasti, yang diterima dan dipakai oleh pemeluknya, sehingga ada penyatuan pendapat.

Keempat, Islam mampu menyediakan filter moral ini melalui sanksi Tuhan dan keimanan kepada pembalasan di akhirat. Kedua hal ini sangat penting karena, pertama, sanksi Tuhan akan mengatur perilaku absolut tidak menimbulkan persengketaan. Tanpa sanksi Tuhan akan menjadi subjek penilaian personal dan persengketaan seperti dalam sekularisme. Kedua, keduanya mampu membentuk komitmen individu (masyarakat) terhadap kemaslahatan semua. Ketiga, hanya Tuhan yang telah menciptakan manusia yang mampu memahami hakikat, kebutuhan, kekuatan dan kelemahan, dan Tuhan satu-satunya pemberi petunjuk hidup yang hakiki.

Kelima, dalam *syariah* setiap usaha (tindakan) diorientasikan pada proses bukan pada tujuan. *Syariah* melarang penggunaan cara-cara yang tidak baik untuk mencapai tujuan yang baik. Orientasi pada proses ini menjadikan individu tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai tindakannya.

Tuhan menurut pandangan Islam akan membalas perbuatan baik dengan imbalan surga dan mengancam perbuatan buruk dengan siksa neraka. Kendati demikian bukan imbalan (pahala) atau siksa yang membuat perbuatan dihukumi secara moral benar atau salah, tetapi karena tindakan itu baik atau buruk oleh karenanya harus diberi pahala atau diberi hukuman. Dalam Islam, hakikat moralitas tidak terletak pada pahala atau siksa itu sendiri melainkan terletak dalam ketaatan yang tulus dan kesadaran seorang muslim untuk tunduk pada kehendak Allah, pahala atau hukuman hanya sekedar akibat mengikuti atau tidak mengikuti kehendak-Nya (Triuwono, 2000, p. 252-253).

Terkait dengan tindakan etis individu jika dihubungkan dengan kepribadian manusia dalam Islam, maka *syariah* (nilai-nilai Islam) dapat menjadi filter sekaligus motivator bagi individu untuk bertindak etis. Islam lebih jauh mengajarkan bahwa superego sebagaimana dalam kerangka pribadi manusia menurut Freud belum memadai untuk menjamin kebenaran setiap tindakan moral seseorang.

Allah mengaruniakan manusia suatu alat radar guna menangkap rahasia-rahasia kegaiban, alat ini disebut dengan ruh (Achmad, 1991, p. 62). Sebagaimana menurut Al Ghazali, bahwa manusia memiliki unsur metafisik, yang terdiri dari nafsu, akal (*aqlu*), hati (*qalbu*), dan ruh. Ruh ini bekerja secara mutlak, tidak kenal kompromi. Dia tetap terjaga dari noda. Walaupun suatu ketika *qalbu* jatuh dalam tarikan nafsu, namun ruh tetap bertahan dan mencela kelemahan *qalbu* tersebut. Dia mengawasi gerak gerik *qalbu* tersebut, dengan jalan menyalurkan sinar-sinar yang disebut "Nur Ilahi" kepada *qalbu* untuk kemudian ditangkap dan diserap oleh *qalbu*. Perasaan berdosa adalah merupakan hukuman yang ditimpakan ruh kepada *qalbu* karena keteledorannya (Achmad, 1991, p. 49). Lebih lanjut Achmad menerangkan bahwa ruh merupakan benteng terakhir yang benar-benar tangguh guna memperkuat pertahanan *qalbu*. Ruh inilah yang menjadi tempat di mana Nur Ilahi disalurkan kepada *qalbu* yang menjadi dasar atau sumber moral yang sebenarnya dan yang pasti aman dari segala kesalahan.

Unsur nafsu selalu menarik manusia kepada kehinaan, sehingga bila manusia banyak dikendalikan oleh nafsunya, maka hanya kerusakan yang bisa diciptakannya. Tetapi bila manusia itu banyak dikendalikan oleh unsur hati dan ruhnyanya yang suci, maka perilaku yang etis dan religius akan selalu tampak pada kehidupan sehari-hari dan kedamaian akan selalu diciptakan. Dengan demikian dengan *syariah* akan hadir perilaku etis karena adanya mekanisme filter yang tepat.

Dengan demikian jika kapitalisme (rasionalitas, sekularitas, utilitarianisme) digunakan sebagai sumber etika, dalam hal ini kode etik profesi akuntan (Indonesia), maka hal itu tidak dapat membuat individu (akuntan) berbuat etis, namun justru sebaliknya berbuat tidak etis. Sebab kode etik merupakan standar moral dan merupakan standar yang paling esensial, karena ia menjadi landasan individu dalam memutuskan apakah keputusan harus diputuskan secara moral atau tidak dan untuk mengambil tindakan dengan berdasar pada landasan standar moral itu. Sebaliknya, jika menggunakan *syariah* sebagai standar suatu perbuatan baik atau buruk, maka tindakan yang akan terwujud adalah tindakan etis. Secara ringkas pada tabel 9 adalah hasil analisis kode etik profesi akuntan.

Tabel 9 Hasil Analisis Kode Etik Profesi Akuntan

Konsep Dasar	Temuan
Tanggung jawab	- Utilitarianisme, yang memberi kontribusi bagi kelangsungan hidup profesi. - Tidak ada tanggung jawab terhadap Tuhan YME.
Kepentingan Publik	Utilitarianisme, memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan saja.
Integritas	Didasarkan pada rasionalitas etika utilitarian.
Obyektivitas	<i>Value free</i> (bebas nilai).
Kompetensi & Kehati-hatian Profesional	Orientasi profesi hanya pada klien.
Kerahasiaan	Standar dan aturan sarat dengan nilai kapitalis, sehingga prinsip kerahasiaan juga membawa nilai kapitalis
Perilaku Profesional	Perilaku yang diharapkan hanya untuk memperoleh kepercayaan publik.
Standar Teknis	Sarat dengan nilai kapitalis.

Sumber : IAI, 2001 dan diolah

4.3 Formulasi Etika Profesi Akuntan Berdasarkan Nilai-nilai Islam

Setelah pembahasan sebelumnya yaitu analisis nilai kapitalis dalam prinsip kode etik profesi akuntan dan meninjau kelemahannya dari perspektif Islam, pada bagian ini akan diajukan sebuah formulasi etika profesi akuntan berdasarkan nilai-nilai Islam.

Prinsip etika profesi akuntan dengan menggunakan *syariah* Islam sebagai landasan, sehingga segala ketentuan yang ada dalam *syariah* mengikat dan menjadi landasan bagi prinsip etika profesi akuntan. Hal ini memberi implikasi bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh prinsip kode

etik profesi akuntan juga merupakan usaha untuk merealisasikan tujuan-tujuan *syariah* seperti yang diuraikan pada bagian sebelumnya.

Secara praktis prinsip etika profesi akuntan bertujuan untuk mengarahkan manusia (akuntan) melakukan tindakan etis yang tidak bertentangan dengan *syariah*, sehingga mengantarkan manusia (akuntan) pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Harahap (2002b, p. 228-229), menyatakan bahwa dengan kode etik yang berlandaskan *syariah* diyakini bahwa akuntan muslim akan termotivasi untuk mematuhi ketentuan *syariah* dan tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan *syariah*, sehingga kode etik akan dapat bermanfaat untuk:

1. Membantu membangun sikap kehati-hatian akuntan dengan menarik perhatiannya pada isu etika dalam praktik profesional sehingga dia dapat memisahkan mana perilaku etis dan non etis sesuai dengan ketentuan *syariah* sebagai dimensi lain dari praktik profesi yang umum.
2. Untuk meyakinkan keakuratan dan keyakinan pada informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sehingga akan memperluas kredibilitas dan mempromosikan keyakinan terhadap jasa profesi akuntan.
3. Kode etik akuntan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *syariah* Islam. Dalam sistem nilai, hal ini ditempatkan sebagai landasan semua nilai dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam setiap legislasi dalam masyarakat dan negara Islam. Namun di samping dasar syariat ini landasan moral juga bisa diambil dari hasil pemikiran manusia yang didasarkan pada keyakinan Islam. Beberapa landasan kode etik akuntan muslim adalah:
 - a. Integritas
Islam menempatkan integritas sebagai nilai tertinggi yang memandu seluruh perilakunya. Islam juga menilai perlunya kemampuan, kompetensi, dan kualifikasi tertentu untuk melaksanakan suatu kewajiban. Yang paling penting dari sikap integritas adalah kepercayaan dan Islam selalu mensyaratkan perlunya jujur kepada Allah, masyarakat dan diri sendiri.
 - b. Prinsip kekhalifahan manusia di bumi
Kekhalifahan ini didasarkan pada prinsip yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di bumi ini adalah Allah dan kepemilikan manusia terhadap kekayaan di bumi ini bukanlah tujuan akhir tetapi sebagai sarana untuk menjalani kehidupan dirinya, keluarganya dan masyarakat.
 - c. Keikhlasan
Landasan ini berarti bahwa akuntan harus mencari kerediaan Allah dalam melaksanakan pekerjaannya bukan mencari nama, pura-pura dan berbagai bentuk kepalsuan lainnya. Menjadi ikhlas berarti akuntan tidak perlu tunduk pada pengaruh atau tekanan luar tetapi harus berdasarkan komitmen agama, ibadah dalam melaksanakan fungsi profesinya. Tugas profesi harus bisa dikonversikan menjadi tugas ibadah. Jika hal ini bisa diwujudkan maka tugas akuntan menjadi bernilai ibadah di hadapan Allah SWT di samping profesi yang berdimensi material dan dunia.

d. Ketakwaan

Takwa adalah sikap ketakutan kepada Allah baik dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan sebagai salah satu cara untuk melindungi seseorang dari akibat negatif dari perilaku yang bertentangan dari *syariah* khususnya dalam hal yang berkaitan dengan perilaku terhadap penggunaan kekayaan atau transaksi yang cenderung pada kezaliman dan hal lain yang tidak sesuai dengan *syariah*.

e. Kebenaran dan bekerja secara sempurna

Akuntan tidak harus membatasi dirinya hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan profesi dan jabatannya tetapi juga harus berjuang untuk mencari dan menegakkan kebenaran dan kesempurnaan tugas profesinya dengan melaksanakan semua tugas yang dibebankan kepadanya dengan sebaik-baik dan sesempurna mungkin. Hal ini tidak akan bisa direalisasikan terkecuali melalui kualifikasi akademik, pengalaman praktik, dan pemahaman serta pengalaman keagamaan yang diramu dalam pelaksanaan tugas profesinya.

f. Takut kepada Allah dalam setiap hal

Seorang muslim meyakini bahwa Allah selalu melihat dan menyaksikan semua tingkah laku hamba-Nya dan selalu menyadari serta mempertimbangkan setiap tingkah laku yang tidak disukai Allah. Ini berarti bahwa seorang akuntan harus berperilaku “takut” kepada Allah tanpa harus menunggu dan mempertimbangkan apakah orang lain atau atasannya setuju atau menyukainya. Sikap ini merupakan sensor diri sehingga ia mampu bertahan terus menerus dari godaan yang berasal dari pekerjaan profesinya.

g. Manusia bertanggung jawab di hadapan Allah

Akuntan Muslim harus meyakini bahwa Allah selalu mengamati semua perilakunya dan dia akan mempertanggungjawabkan semua tingkah lakunya kepada Allah nanti di akhirat baik tingkah laku yang kecil maupun yang besar. Karenanya akuntan harus berupaya untuk selalu menghindari pekerjaan yang tidak disukai oleh Allah SWT karena dia takut akan mendapat hukuman nantinya di akhirat.

Secara ringkas kode etik profesi akuntan dalam perspektif Islam dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10 Kode Etik Profesi Akuntan dalam Perspektif Islam

Kode Etik Profesi	Nilai / Item
Tanggung jawab	Adanya tanggung jawab secara moral baik di hadapan publik, lingkungan, sosial, maupun terhadap Tuhan YME, sebagai manifestasi dimensi horizontal dan vertikal.
Kepentingan Publik	Memberikan manfaat tidak hanya pada pihak-pihak yang berkepentingan, tetapi juga terhadap pihak-pihak lain (masyarakat, lingkungan).
Integritas	Kepercayaan, dan jujur terhadap Allah SWT, masyarakat dan diri sendiri.
Obyektivitas	Lebih bernilai, terutama nilai moral yang bersifat humanis dan profan.
Kompetensi & Kehati-hatian Profesional	Melaksanakan jasa profesional <i>at all cost</i> , sehingga ia bebas dari tanggung jawab yang dibebankan kepadanya bukan saja dari atasan, profesi, publik, tetapi juga dari Allah SWT.
Kerahasiaan	Standar dan aturan berdasarkan nilai <i>syariah</i> .
Perilaku Profesional	Semua perilaku dan tingkah laku harus di filter dan didorong oleh nilai-nilai Islam.
Standar Teknis	Standar dan aturan berdasarkan <i>syariah</i>
Kesatuan (<i>unity</i>)	Tercermin dalam konsep tauhid, memadukan keseluruhan aspek kehidupan menjadi suatu <i>homogeneous whole</i> (keseluruhan homogen).
Keseimbangan (<i>equilibrium</i>)	Menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta.
Kehendak bebas (<i>ikhtiyar</i>)	Kebebasan untuk mengarahkan dan membimbing kehidupannya sendiri sampai pada tingkatan tertentu.
Kebajikan (<i>ihsan</i>)	Tindakan yang menguntungkan orang lain tanpa kewajiban apa pun.

Sumber : Harahap, 2001, p. 237 dan diolah

Dengan menggunakan landasan dan prinsip etika profesi akuntan seperti yang dijelaskan, maka etika profesi akuntan tidak lagi bersifat sekuler sehingga etika tersebut membawa nilai-nilai Islam yang bersifat universal, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.

5. Simpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan tujuan penelitian ini diharapkan mampu sebagai alternatif dari etika profesi akuntan yang bukan saja tidak sejalan dengan ajaran Islam, tetapi juga dinilai tidak menunjukkan keseimbangan, keadilan, dan kejujuran sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam. Sehingga etika profesi akuntan *syariah* diharapkan mampu mencegah timbulnya tindakan “amoral” akuntan agar dapat memberikan manfaat terhadap semua pihak.

Dari pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, Prinsip etika profesi akuntan Indonesia sarat dengan nilai kapitalis. Nilai kapitalis yang dimaksud adalah kentalnya semangat rasionalisme, sekularisme, etika utilitarianisme dan nihilnya nilai tanggung jawab terhadap Tuhan YME dan lingkungan sosial. *Value free*, serta asumsi asimetri kepentingan pribadi dan kepentingan sosial. Kedua, dalam pandangan Islam,

prinsip etika profesi akuntan memiliki kelemahan-kelemahan terutama dalam mekanisme filter terhadap individu. Kelemahan tersebut paling tidak terletak pada prinsip-prinsip yang mendasarinya, yakni; prinsip sekuler dan utilitarianis yang menyebabkan manusia (akuntan) menafikan keberadaan Tuhan sebagai pencipta segala kosmos kehidupan, *materialism oriented*, mementingkan kepentingan diri sendiri, serakah, menghalalkan segala cara, dan cenderung membuat orang (akuntan) berlaku tidak adil. Ketiga, Kode etik profesi akuntan berdasarkan nilai-nilai Islam adalah: tanggung jawab, kepentingan publik, integritas, obyektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, standar teknis, kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, dan kebajikan.

Penelitian ini sangat tergantung pada pengetahuan yang dimiliki sangat terbatas, sehingga penelitian ini masih sangat dangkal. Hal ini memberi peluang bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam terutama pada perumusan peraturan kode etik. Penelitian ini hanya membahas pada landasan filosofis etika profesi akuntan, sehingga penelitian selanjutnya dapat meneruskan sampai pada pedoman peraturan kode etik profesi akuntan berdasarkan Islam.

Adanya kelemahan-kelemahan dalam kapitalisme, terutama dalam mengarahkan individu (Akuntan) untuk bertindak tidak etis maka hendaknya semua orang berpikir ulang dalam mempertahankan penggunaannya, terutama sebagai landasan etika profesi akuntan. Indonesia sebagai negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam, penerapan konsep Islam (*syariah*) dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam aktivitas ekonomi "*muamalah*" terutama profesi akuntan sangat relevan dan seharusnya menjadi suatu kebutuhan. Hal itu disebabkan karena dalam Islam tidak ada istilah dikotomi antara agama dan aktivitas kehidupan sehari-hari.

Namun demikian, walaupun Indonesia bukanlah negara yang di dasari oleh syariat Islam tetapi bukan berarti konsep ini tidak bisa digunakan di negara ini. Nilai-nilai yang bersifat universal, humanis, teologikal, adil, humanis, dan fleksibel akan membuat etika profesi akuntan dapat diterima oleh seluruh kalangan, baik muslim maupun non-muslim.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Yusuf. 2000. *Dekonstruksi Nilai-nilai Agency Theory dengan Nilai-nilai Syariah: Suatu Upaya Membangun Prinsip-prinsip Akuntansi yang Bernafaskan Islam*. Skripsi tidak dipublikasikan. Malang: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Achmad, Mudlor. 1991. *Etika dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Aji, Gunawan dan Arifin, Sabeni. 2003. Pengaruh Etika Kerja Islam Terhadap Komitmen organisasi dengan Komitmen Profesi Sebagai Variabel Intervening. *Simposium Nasional Akuntansi VI*. Surabaya. 16-17 Oktober.
- Al Qalami, Abu Fajar. 2003. *Al Ghazali: Ringkasan Ihya Ulumudin*. Surabaya: Gita Media Press.
- Al Qur'an dan Terjemahannya. 1995. Departemen Agama RI. Serang: Karya Toha Putra.
- Anonim 1, 2003. Konggres Akuntan sedunia: Kredibilitas Profesi Sedang Dipertaruhkan. *Media Akuntansi*.
- Anonim 2, 2002. Penegakkan Etika Profesi Upaya Menciptakan Akuntan yang Profesional. *Media Akuntansi*.
- As'udi, Mohammad. 2001. *Relevansi Model-model dan Relevansi Rengukuran Laba Akuntansi Konvensional Terhadap Akuntansi Syariah (Studi Kualitatif Terhadap Konsep Laba dengan Pendekatan Historical Cost dan Business Income dalam Akuntansi Syariah)*. Skripsi tidak dipublikasikan. Malang: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Chapra, M. Umer. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Perss.
- Fauroni, Lukman. 2002. Rekonstruksi Etika Bisnis: Perspektif Al-Qur'an. *Simposium Nasional I, sistem Ekonomi Islami*. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. Yogyakarta.
- Fauziyah, Siti. 2004. *Persepsi Akuntan Publik dan Pemakai Jasa Akuntan Publik Terhadap Penerapan Kode Etik Akuntan Publik*. Skripsi tidak dipublikasikan. Malang: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang.
- Ghofar, Abdul. 1999. *Analisis Implikasi Pemikiran dan Penafsiran Akuntansi dari Paradigma Islam dalam Kerangka Analisis Konsep Tao*. Skripsi tidak dipublikasikan. Malang: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Ghozali, Imam. 2003. Etika Bisnis dan Sistem Pendidikan Tinggi Akuntansi. *Seminar dan Lokakarya "Relevansi Sistem Pendidikan Berbasis Intelectual Emotional Spiritual Intelligent" Pada Perguruan Tinggi Akuntansi*. Universitas Brawijaya. 7-8 April.
- Harahap, Sofyan Safri. 1997. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2002a. Akuntan Publik di Indonesia dan kasus Enron. *Media akuntansi*. 25/April.
- _____. 2002b. *Auditing dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2001, *Standar Profesional Akuntan Publik*, Jakarta : Salemba Empat.

- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Kusuma, Robby Perdana. 2003. *Analisa Aspek Moral Etika dalam Karakteristik Kualitatif Informasi Akuntansi*. Skripsi tidak dipublikasikan. Malang: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Muhammad. 2002. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muhammad. 2004. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mulyadi, Kanaka Puradireja. 1998. *Auditing*. E Belkaoui, Ahmed. 2000. *Teori Akuntansi*. Buku 1. dialihbahasakan. Marwata, dkk. Jakarta: Salemba Empat. Edisi 5. Jakarta. Salemba Empat.
- Mustaq, Ahmad. 2001. *Etika Bisnis dalam Islam*. Edisi Indonesia. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Nasir, Muhammad. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Purba, Widya Palupi. 2003. *Peranan Manajemen Qalbu dalam Pengambilan Keputusan Etis Akuntan*. Skripsi tidak dipublikasikan. Malang: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Purnomo, Sugiarto Adi. 2000. *Tauhid Uluhiyah Sebagai Landasan Moral dalam Rangka Meningkatkan Profesionalisme Akuntan*. Skripsi tidak dipublikasikan. Malang: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema insani Press.
- Rasi, Fathor. 2003. *Akuntansi Mainstream dalam Perspektif Islam: Sebuah Upaya Membangun Nilai-nilai Akuntansi Yang Berbasis Syari'ah*. Skripsi tidak dipublikasikan. Malang: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang.
- Setiabudi, Hendry dan Triuwono, Iwan. 2002. *Akuntansi Ekuitas: Dalam Narasi Kapitalisme, Sosialisme, dan Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sihwahjoeni dan M. Gudono. 2000. Persepsi Akuntan terhadap Kode Etik Akuntan. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, vol. 3, No. 2, Juli.
- Suryabrata, Sumadi. 1984. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Tommy. 1999. Pelanggaran Etika Profesi. *Media Akuntansi*. Agustus, no.2/ TH. 1.
- Triuwono, Iwan. 2000. *Akuntansi dan Organisasi Syariah*. Yogyakarta: LKIS.
- Winarna, Jaka dan Ninuk Retnowati. 2003. *Persepsi Akuntan Pendidik, Akuntan Publik, dan Mahasiswa terhadap Kode Etik IAI*, makalah dipresentasikan dalam Simposium Nasional Akuntansi VI (September 16-17), Surabaya
- Ya'qub, Hamzah. 1983. *Etika Islam: Pembinaan Akhlaqul Karimah*. Bandung: CV. Diponegoro.
- Yusuf, Amir Abadi. 1996. *Auditing Pendekatan Terpadu*. Edisi Indonesia. Jakarta. Salemba Empat.

Yusuf, Choirul Fuad. 1997. Etika Bisnis Islami: Sebuah Perspektif Lingkungan Global. *Ulumul Qu'ran*. Jakarta. PT. Grafimatra Tatamedia.